

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usahanya dengan menerapkan nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Koperasi merupakan penggerak ekonomi kerakyatan yang berbasis pada anggota, dimana semakin banyak jumlah anggota maka semakin besar potensi kekuatan koperasi. Koperasi sebagai unit bisnis diberikan kesempatan untuk menjalankan usaha dalam rangka memperoleh keuntungan namun harus sesuai dengan karakteristik dan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Di Indonesia terdapat berbagai jenis koperasi salah satunya adalah Koperasi Pegawai Negeri (KPN). Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi pegawai negeri merupakan koperasi primer yang anggotanya para pegawai negeri yang berdiri di lingkup departemen atau instansi terkait. Koperasi pegawai negeri didirikan dengan tujuan untuk menyejahterakan seluruh anggotanya, dibentuknya koperasi ini diharapkan mampu menjamin kebutuhan para anggotanya yaitu pegawai negeri yang berada dilingkup terkait

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi menyatakan bahwa, koperasi dituntut memiliki pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang dilaporkan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT). Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan “Laporan keuangan yang berkualitas merupakan laporan keuangan yang memenuhi empat aspek yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami”. Laporan keuangan akan dapat dipahami jika sumber daya manusia yang membuat laporan keuangan mengerti tentang prosedur penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar. Laporan keuangan yang disusun secara baik dan akurat dapat memberikan gambaran keadaan yang nyata mengenai hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan selama kurun waktu tertentu. Laporan keuangan sangat penting sebab menjadi dasar untuk menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan.

Menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas bukanlah hal yang mudah, karena laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas jika telah memenuhi empat indikator yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka diperlukan sumber daya

manusia yang berkompeten dan memiliki pengalaman kerja di bidang akuntansi. Sumber daya manusia merupakan kunci dalam meningkatkan keberhasilan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber daya manusia dalam suatu badan usaha merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam suatu organisasi, sehinggadapat dikatakan bahwa kualitas laporan keuangan sangat ditentukan oleh sumber daya manusianya baik itu dilihat dari tingkat pendidikan maupun pengalaman kerja yangdimilikinya. Laporan keuangan koperasi perlu dinilai untuk mengetahui apakah koperasi berada dalam kategori sehat atau tidak untuk tetap dapat beroperasi.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor:06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Penilaian Kesehatan Koperasi, penilaian kesehatan koperasi sudah ada sejak tahun 1970-an dimana kala itu upaya peningkatan kuantitas dan kualitas koperasi terus dilakukan oleh pemerintah. Diawali dengan munculnya koperasi percontohan pada awal tahun 1970-an kemudian disusul dengan program koperasi mandiri dan koperasi perkotaan mandiri pada pertengahan 1980-an, di awal 1990-an menjadikan perlu adanya penilaian kesehatan untuk koperasi.

Dengan adanya Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor:06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Penilaian Kesehatan Koperasi, hal ini tidak terlepas dari perhatian Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karangasem. Kesehatan koperasi dinilai dari sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang berkualitas, informasi dapat dikatakan berkualitas apabila informasi tersebut akurat, tepat waktu, relevan, lengkap, *correctness* dan *security*. Dari adanya penilaian kesehatan koperasi tersebut

ditemukan bahwa di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali masih terdapat koperasi yang berada dalam kategori tidak sehat (dalam pengawasan khusus). Pernyataan Ibu Kadek Widiantari selaku tim pengawas Koperasi di Kabupaten Karangasem bahwa tiga hal yang dapat diindikasikan sebagai permasalahan yang dialami oleh sejumlah KPN di Kabupaten Karangasem, yakni organisasi yang tidak berjalan, usaha yang macet dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang belum memenuhi syarat. Koperasi Pegawai Negeri di Kabupaten Karangasem yang berada dalam kategori tidak sehat ini bukan berarti bubar, namun Koperasi Pegawai Negeri yang tidak menjalankan prosedur secara benar. Seperti permasalahan dalam laporan keuangan yang tidak sesuai dengan panduan pembuatan laporan keuangan sehingga menghasilkan penilaian yang kurang baik. Dari 17 Koperasi Pegawai Negeri (KPN) di Kabupaten Karangasem beberapa diantaranya dinyatakan kurang sehat dikarenakan tidak mempunyai sistem pengendalian internal yang efektif, dan laporan keuangan yang dibuat menghasilkan penilaian yang tidak sehat.

Rapat Anggota Tahunan (RAT) menjadi hal yang penting dalam menilai kesehatan koperasi, dengan dilaksanakannya RAT oleh koperasi akan menunjukkan posisi laporan keuangan koperasi itu sendiri. Sesuai dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM bahwa permasalahan yang ada pada koperasi di Kabupaten Karangasem yaitu keterlambatan dan tidak dilaksanakannya RAT oleh beberapa koperasi yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan koperasi tidak baik sehingga koperasi ini mendapat penilaian yang tidak sehat. Hal ini didukung dengan adanya penilaian yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM yang menunjukkan bahwa laporan keuangan

tersebut tidak memenuhi aspek relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami sehingga koperasi ini dinyatakan tidak sehat.

Alasan penentuan Koperasi Pegawai Negeri menjadi fokus kajian dalam penelitian ini dikarenakan pada Koperasi Pegawai Negeri ini masih terjadi masalah kredit macet, jika dilihat dari teori dan karakteristik KPN bahwa tingkat risiko pengembalian kreditnya sangat kecil karena ketika seseorang meminjam uang pada KPN maka dibayarnya dengan potong gaji. Namun pada kenyataannya hal ini tidak berlaku di beberapa KPN di Kabupaten Karangasem, masih banyak KPN yang mengalami permasalahan kredit macet sehingga dengan adanya hal ini beberapa KPN sulit untuk berkembang. Jika dilihat dari teori yang ada dan praktek dilapangan maka tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga banyak KPN di Kabupaten Karangasem sulit untuk berkembang.

Kabupaten Karangasem menjadi tempat penelitian penulis karena dari penilaian kesehatan koperasi di seluruh kabupaten, peneliti menemukan bahwa hanya di Kabupaten Karangasem yang terdapat 47, unit Koperasi yang dikategorikan bermasalah (Dalam Pengawasan Khusus), 47 koperasi yang dikategorikan bermasalah ini tidak hanya jenis koperasi pegawai negeri saja namun dari berbagai jenis koperasi yang terdapat di Kabupaten Karangasem seperti KSP, KSU, KUD dan yang lainnya. Jumlah KPN yang bermasalah di Kabupaten Karangasem sebanyak 10 unit dari 23 KPN, permasalahan yang terjadi yaitu adanya keterlambatan/tidak dilaksanakannya RAT oleh 10 unit KPN ini.

Berbeda dengan 8 Kabupaten lainnya sehingga penulis merasa bahwa Kabupaten Karangasem tempat yang tepat dijadikan sebagai objek penelitian, berikut rincian data koperasi yang ada di seluruh kabupaten :

**Tabel 1.1**  
**Data Penilaian Kesehatan Koperasi**  
**kab/kota se- Bali tahun 2019**

<b>N O</b>	<b>NAMA KAB/KOTA</b>	<b>SEHA T</b>	<b>CUKUP SEHAT</b>	<b>DALAM PENGA WASAN</b>	<b>DALAM PENGA WASAN KHUSUS</b>	<b>TOTAL JUMLA H</b>
1	PROVINSI	24	64	14	-	102
2	TABANAN	16	75	1	-	92
3	BANGLI	5	45	-	-	50
4	KARANGASEM	6	60	1	47	114
5	DENPASAR	21	66	14	-	101
6	KLUNGKUNG	4	9	3	-	16
7	GIANYAR	29	38	-	-	67
8	JEMBRANA	4	51	-	-	55
9	BADUNG	29	147	12	-	188
10	BULELENG	1	48	1	-	50
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>138</b>	<b>604</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>835</b>

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali (2020)

**Tabel 1.2**  
**Data Koperasi yang Tidak Aktif**  
**kab/kota se- Bali tahun 2019**

<b>NO</b>	<b>NAMA KAB/KOTA</b>	<b>JUMLAH</b>
1	TABANAN	53
2	BANGLI	22
3	KARANGASEM	111
4	DENPASAR	12
5	KLUNGKUNG	26
6	GIANYAR	12
7	JEMBRANA	61
8	BADUNG	30
9	BULELENG	49
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>376</b>

Sumber : Data Diolah (2020)

Menurut Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karangasem, dinyatakan bahwa pada KPN di Kabupaten Karangasem masih ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya yaitu: (1) pegawai koperasi dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan *job description*. (2) Data administrasi cenderung tidak sesuai atau kurang sistematis. (3) Pemahaman akuntansi berdasarkan SAK-

ETAP di beberapa KPN belum dikuasai dengan baik oleh pengurus KPN. (4) Pengalaman kerja di bidang akuntansi tidak terlalu banyak dimiliki oleh pengurus. (5) Masih kurangnya pemahaman teknologi sehingga pemanfaatannya kurang dapat dimaksimalkan. Permasalahan tersebut akan berdampak pada laporan keuangan yang disajikan oleh KPN. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pada koperasi pegawai negeri menitikberatkan pada kualitas pembukuan atau laporan keuangan.

Proses akuntansi dalam membuat suatu laporan keuangan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang diterapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Pemahaman pengurus koperasi tentang akuntansi koperasi berbasis SAK-ETAP dalam penyusunan laporan keuangan koperasi belum dikuasai sehingga laporan keuangan yang dihasilkan belum maksimal yang akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan berbasis SAK-ETAP harus diterapkan oleh KPN dan dicek silang kepada pengurus saat dilakukan penilaian kesehatan. Penyusunan laporan keuangan dengan panduan SAK-ETAP penting dilakukan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan variabel pemahaman akuntansi koperasi berbasis SAK-ETAP mendapatkan hasil konsisten antara peneliti satu dengan yang lainnya, penelitian tersebut antara lain penelitian yang dilakukan oleh Adiputra (2017), Dewi (2018) dan Arismawati (2017) yang menunjukkan bahwa Pemahaman Akuntansi Koperasi Berbasis SAK-ETAP berpengaruh secara

positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan koperasi. Jadi, pemahaman akuntansi koperasi berbasis SAK-ETAP dan kualitas laporan keuangan berbanding lurus, jika semakin tinggi pemahaman akuntansi koperasi berbasis SAK-ETAP yang dimiliki oleh karyawan maka semakin tinggi juga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan koperasi.

Faktor lain yang menyebabkan rendahnya kualitas laporan keuangan koperasi adalah kurangnya pemanfaatan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan bagian yang sangat penting untuk meningkatkan efisiensi organisasi dan mendukung daya saing dengan menyediakan informasi keuangan dan akuntansi bagi manajemen (Alsarayreh *et al.*, 2011). Menurut Azhar Susanto (2017:80) sistem informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan (integrasi) dari sub-sub sistem/komponen baik fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan. Sistem informasi akuntansi yang membantu proses pencatatan dan pelaporan anggaran dan keuangan, membantu proses identifikasi, pengukuran, dan pengambilan keputusan ekonomi. Jadi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan kualitas laporan keuangan berbanding lurus, jika semakin tinggi pemanfaatan sistem informasi akuntansi maka semakin tinggi juga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan koperasi.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi mendapatkan hasil yang beragam. Penelitian tersebut antara lain penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2018), Evicahyani (2016), Pransisca (2016) dan Sari (2015) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi

akuntansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan namun, terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rianisanti (2017), Artana (2016) dan Diani (2016) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sistem pengendalian internal. Menurut Hery (2013:159), sistem pengendalian intern adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya. Sejak tahun 1992, *The Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission* (COSO) memperkenalkan kerangka pengendalian yang terdiri dari lima unsur sebagai berikut: 1) lingkungan pengendalian, 2) penilaian risiko, 3) prosedur pengendalian, 4) pemantauan dan 5) informasi dan komunikasi.

Hal ini menunjukkan bahwa jika penerapan pengendalian internal akuntansi berjalan dengan baik, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan mempunyai nilai informasi yang baik. Jadi, pengendalian internal akuntansi dan kualitas laporan keuangan berbanding lurus, jika semakin tinggi pengendalian internal akuntansi, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh koperasi.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan variabel sistem pengendalian internal mendapatkan hasil yang beragam. Penelitian tersebut antara lain

penelitian yang dilakukan oleh Oktafiani (2018), Oktaviyanti (2017) dan Untary (2015) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan Suryani (2018) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Hubungan kesehatan koperasi dengan kualitas laporan keuangan adalah kesehatan KPN menjadi hal yang penting sebagai penentu perkembangan KPN dalam menjalankan usahanya. Penilaian kesehatan KPN menghasilkan predikat sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus hal ini dapat ditunjang dengan indikator pemahaman akuntansi koperasi berbasis SAK-ETAP, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal. Jadi, pemahaman akuntansi koperasi berbasis SAK-ETAP dan kualitas laporan keuangan berbanding lurus jika semakin tinggi pemahaman akuntansi koperasi SAK-ETAP, maka semakin tinggi juga kualitas laporan keuangan koperasi.

Penelitian ini merujuk pada penelitian Adiputra (2017) perbedaan penelitian ini dengan penelitian Adiputra (2017), yaitu penggantian variabel kualitas pelatihan dengan pemanfaatan sistem informasi akuntansi variabel ini dirasa perlu diganti karena melihat permasalahan yang terjadi pada KPN di Kabupaten Karangasem. Pada penelitian ini Sistem Pengendalian Internal merupakan variabel pemoderasi alasan peneliti menjadikan Sistem Pengendalian Internal sebagai variabel pemoderasi adalah untuk melihat peranan Sistem Pengendalian Internal apakah dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara Pemahaman Akuntansi Koperasi Berbasis SAK-ETAP dan Pemanfaatan Sistem Informasi

Akuntansi dengan Kualitas Laporan Keuangan. Seperti dijelaskan oleh Sugiyono (2009) bahwa variabel moderating (pemoderasi) bertujuan untuk melihat perannya dalam memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel dependen dan independen.

Penelitian yang berkaitan dengan variabel pemoderasi dilakukan oleh Rianisanti (2017) dan Arista (2018) hasil penelitian Rianisanti menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak memoderasi hubungan antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan sistem pengendalian intern dapat memoderasi hubungan antara kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Arista menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sistem kontrol internal tidak memoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan dan Sistem Pengendalian Intern tidak memoderasi hubungan antara Penerapan sistem akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan paparan latar belakang dan permasalahan yang ada pada Koperasi Pegawai Negeri diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Determinan Kualitas Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Negeri: Pengujian Peran Moderasi Tingkat Penerapan Sistem Pengendalian Internal”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, identifikasi masalahnya yaitu :

1. Masih rendahnya pemahaman akuntansi koperasi berbasis SAK-ETAP yang dimiliki oleh pegawai bagian keuangan pada koperasi pegawai negeri.
2. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan pemanfaatan teknologi sistem informasi akuntansi yang dimiliki pegawai pada koperasi pegawai negeri.
3. Masih lemahnya sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh manajemen pada koperasi pegawai negeri.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Untuk memudahkan melakukan penelitian, dalam penelitian ini peneliti memfokuskan untuk meneliti permasalahan terkait dengan variabel pemahaman akuntansi koperasi berbasis SAK-ETAP, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian internal sebagai variabel pemoderasi terhadap kualitas laporan keuangan KPN. Pembatasan masalah dalam penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karangasem yang berfokus terbatas pada kualitas laporan keuangan KPN. Data utama yang digunakan penelitian ini diperoleh dari hasil jawaban kuisioner yang telah diisi oleh responden terkait.

## 1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana pengaruh pemahaman akuntansi koperasi berbasis SAK-ETAP terhadap kualitas laporan keuangan koperasi pegawai negeri?
2. Bagaimana pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan koperasi pegawai negeri?
3. Bagaimana pengaruh penerapan sistem pengendalian internal pada hubungan antara pemahaman akuntansi koperasi berbasis SAK-ETAP dan kualitas laporan keuangan koperasi pegawai negeri?
4. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal pada hubungan antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan koperasi pegawai negeri?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menanamkan bukti empiris mengenai :

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi koperasi berbasis SAK-ETAP terhadap kualitas laporan keuangan pada koperasi pegawai negeri.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada koperasi pegawai negeri.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem pengendalian internal terhadap hubungan antara pemahaman akuntansi koperasi berbasis SAK-ETAP dengan kualitas laporan keuangan pada koperasi pegawai negeri.

4. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem pengendalian internal terhadap hubungan antarpemanfaatan sistem informasi akuntansi dengan kualitas laporan keuangan pada koperasi pegawai negeri.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan referensi tentang pengaruh pemahaman akuntansi koperasi berbasis SAK-ETAP, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan KPN, sehingga hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti berikutnya.
- b. Penelitian ini dapat membuktikan secara empiris bahwa asumsi-asumsi pada teori keagenan (*agency theory*) sejalan dan relevan dengan implementasi yang dilakukan di lapangan.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan bagi pengembangan ilmu dan teori di bidang akuntansi yang berkaitan dengan peningkatan kualitas laporan keuangan, dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Manajemen Koperasi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi manajemen koperasi terkait dengan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan KPN dengan demikian faktor-faktor tersebut dapat ditingkatkan penerapannya. Sehingga kedepannya laporan keuangan yang dihasilkan oleh koperasi akan semakin berkualitas.

b. Bagi Mahasiswa

Melalui penelitian ini, mahasiswa dapat mengetahui bagaimana laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

